

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di suatu Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi menganut kepercayaan bahwa kesejahteraan social merupakan tanggung jawab dari masyarakat dan tanggung jawab ini harus dipenuhi oleh pemerintah. Sistem pemerintahan demokrasi memberikan kebebasan dan kewenangan bagi rakyat untuk berpendapat dan menentukan atau memilih sebuah pilihan tanpa ada paksaan dari siapapun tetapi tetap berpegang teguh pada hukum yang berlaku, demokrasi sendiri dapat dilaksanakan secara langsung ataupun secara perwakilan.

Hal yang paling mendasar dari demokrasi yaitu system pemerintahan yang menitik beratkan atau mempusatkan pada rakyat yang dimana mencakup berbagai macam aspek dalam pemerintahan dalam system pemerintahan demokrasi menjadikan manusia sebagai mahluk yang bermartabat dan berdaulat demokrasi pada arti yang sesungguhnya yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dilihat dari system demokrasi di Indonesia berarti kita berbicara atau berujung pada yang namanya kedaulatan. Karena system kedaulatan mempunyai hubungan yang erat dengan system demokrasi yang ada di Indonesia.

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dimana rakyat mempunyai kekuatan penuh untuk menjalankan demokrasi di Indonesia dan rakyat juga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam menentukan pandangan dan arah hidup bangsa kedepan. Di Indonesia sendiri system demokrasi atau kita kenal dengan *trias politika* yang membagi tiga kekuasaan politik Negara yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif.

Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa system kedaulatan dapat dilaksanakan melalui pemilihan umum (PEMILU) dan pemilihan umum merupakan

bagian dari demokrasi. Dalam Negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum (PEMILU) menjadi salah satu kunci sukses terciptanya demokrasi, pemilihan umum merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa diikuti pemilihan umum maka dari itu Negara yang menganut paham demokrasi harus mengadakan pemilihan umum karena salah satu keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum, pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut serta menentukan figure dan arah kepemimpinan Negara dalam waktu tertentu di Negara Indonesia pemilihan umum kembali akan di laksanakan pada 2019 yaitu suatu perelatan yang di laksanakan tiap lima tahun sekali dan kali ini di 2019 akan diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden, di indonesia pemilihan presiden sudah dimulai sejak beberapa tahun kemarin mulai dari tahun 2004, 2009 dan 2014 dan ditahun 2019 ini kembali diadakan. Wujud implementasi demokrasi di Negara ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang*”. Oleh sebab itu, rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dan mengemukakan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi, seperti kebebasan memilih dan dipilih. Wujud dari hak-hak rakyat, antara lain melalui pelaksanaan pemilihan umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Bahwa sanya Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam Pemilihan Umum tidak lepas dari keterlibatan masyarakat dalam memilih dan keterlibatan semua aparatur pemerintahan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilihan Umum dapat juga dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan hak memilihnya. Berdasarkan penjelasan diatas maka

dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat perwujudan dari pada perilaku politik masyarakat yaitu melalui pemilihan umum. Salah satu persyaratan pemilu yang baik yaitu keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik.

Partisipasi Politik merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi penyelenggaraan Negara. Almond dan Verba (dalam Rahmawati dan Muhlin, 2016 : 27) membedakan partisipasi politik menjadi dua bentuk yaitu, bentuk konvensional dan bentuk non konvensional, mereka mengatakan bahwa permasalahan partisipasi politik masyarakat baik yang bersifat non konvensional maupun konvensional dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu: (1) Pemungutan suara, (2) Aktivitas diskusi politik, (3) Kegiatan kampanye, (4) Aktivitas membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain, (5) Komunikasi individu dengan pejabat politik. Berdasarkan partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba diatas Indikator partisipasi politik masyarakat tersebut menjadi dasar analisis untuk menguji sejauh mana partisipasi politik masyarakat. Salah satu hal yang mempengaruhi partisipasi politik adalah keberadaan Pemilih Pemula.

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemilih Pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Pengaruh pemilih pemula yang sangat penting dan signifikan pada pemilu sudah disadari oleh partai politik beserta para calon kandidatnya. Bahkan perburuan suara pemilih pemula sudah dimulai sejak pemilu yang sudah diselenggarakan selama

dua tahun terakhir yaitu banyak yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilih pemula dalam proses kampanye sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara pemilih pemula ini. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah pendidikan politik yang masih rendah yang membuat kelompok ini rentan menjadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam (Wardhani, 2018 : 58-59).

Jika dicermati, konsekuensi Golput yang selalu mengganggu partisipasi politik adalah golongan pemilih pemula dan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap. Intinya partisipasi politik pemilih pemula menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini di karenakan kurangnya kemampuan kognitif pemilih pemula terhadap pemilu. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih (*voting*) pada pemilu sebelumnya. Namun ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik. Pemilih pemula pada pemilu adalah generasi baru memilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal dikawasan perkotaan atau sekitarnya kelompok ini sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari handpone, laptop, tablet, dan aneka gadget lainnya. Mereka juga sangat pasif dalam menggunakan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti twitter, facebook, whatsapp, dan sebagainya. Mereka sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru kritis dan juga mandiri.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas hasil survey awal menunjukkan bahwa ternyata tidak terjadi di Kecamatan Sumalata Timur, Karena data menunjukkan bahwa 100% pemilih pemula di kecamatan sumalata timur menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu 2019. Hal ini dikarenakan tingkat kognitif pemilih pemula terhadap pelaksanaan pemilu itu mencapai 90%. Dalam hal aspek kognitif pemilih pemula sudah memiliki kemampuan dalam memahami bagaimana cara-cara

memproses informasi dan juga memahami dunia sekitar mereka, karena dari kalangan pemilih pemula yang berada di daerah ini sebagian besar sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, dan juga diantara mereka berasal dari kalangan pelajar/mahasiswa, seperti yang sudah dijelaskan diatas mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari handpone, tablet, dan aneka gadget lainnya. Keberadaan media tersebut sangat membantu pemilih pemula dalam memahami dan mengetahui pelaksanaan politik 2019. Hal ini tergambarkan dalam pengetahuan kognitif pemilih pemula seperti tanggal pelaksanaan pemilu, lembaga-lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, peserta pemilu baik partai politik maupun calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, serta pemilih pemula menyadari akan arti dari kewajiban warga negara dalam memberikan hak politiknya.

Aspek kognitif ini tentunya di dukung oleh faktor yang mendorong pemilih pemula untuk berpartisipasi pada pemilu 2019, diantaranya faktor-faktor tersebut adalah:

Pertama, Orang Tua, dimana orang tua sebagai kepala keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan hak politik pemilih pemula, peran orang tua merupakan langkah awal dalam menumbuhkan kesadaran politik dalam kehidupan pemilih pemula. Orang tua memberikan pengertian dan arahan kepada anak tentang kesadaran politik sehingga unsur-unsur tentang kesadaran politik dapat disampaikan secara mudah dan jelas. *Kedua*, Keluarga, melihat kesamaan pandangan anggota keluarga lainnya terhadap pilihan tertentu yakni dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon (atau tokoh dibelakang) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.

Ketiga, Teman Dekat, berbicara tentang masalah afiliasi mereka dalam kehidupan keseharian yakni adanya komunikasi internal dari kalangan teman sebaya, pengaruh teman sebaya atau sepermainan menjadi faktor yang patut dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik, teman sebaya dipercaya tidak hanya bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan positif

tetapi juga mempengaruhi persepsi dan tindakan negatif sehingga kecenderungan perilaku politiknya berpotensi homogen dengan perilaku politik teman dekatnya. *Keempat*, Visi dan Misi, melihat perilaku memilih masyarakat yang berada di daerah ini terhadap pemilu 2019 juga menunjukkan bahwa faktor kandidat (figur pasangan calon) mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap perilaku pemilih, karena pemilih melihat kandidat dari citra suatu kandidat yakni visi/misi dari pasangan calon juga mempengaruhi perilaku pemilih selain kesamaan agama juga kesamaan dari daerah asal dengan kandidat yang dipilih.

Kelima, Ideologi Partai, yakni mengarah pada pendekatan psikologis mengasumsikan jika perilaku memilih individu ditentukan oleh faktor psikis seseorang seperti identifikasi diri terhadap partai politik, jadi pemilih pemula memilih berdasarkan pada pertimbangan politik yang diusung dari partai yang sama yang dipilih. *Keenam*, pilihan sendiri, yakni berangkat dari kesadaran diri atau motivasi dari diri mereka sendiri bahwa kesadaran sebagai warga negara yang baik itu tercermin lewat pilihan politik mereka dimana motivasinya berangkat dari diri sendiri untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suara.

Dengan melihat permasalahan partisipasi pemilih pemula berdasarkan yang sudah diutarakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul **“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 di Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di kemukakan di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa Deme II, Kecamatan Sumalata Timur pada Pemilihan Umum 2019
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas maka adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa Deme II, Kecamatan Sumalata Timur pada Pemilihan Umum 2019
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula.

1.4. Manfaat penelitian

Setiap penelitian tentu diharapkan bisa memberikan manfaat bagi peneliti, masyarakat ataupun pembaca bahkan seluruh mahasiswa yang berada di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo manfaat dapat diperoleh berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan demikian maka manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis tentang fenomena pemilu yang terjadi di Indonesia, mengetahui: Bagaimana Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa Deme II, Kecamatan Sumalata Timur pada Pemilihan Umum 2019 dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula.
- b. Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai suatu rujukan untuk menangani fenomena pemilu yang ada di Indonesia.
- c. Manfaat bagi pembaca dapat memberikan informasi mengenai fenomena yaitu Partisipasi Politik Pemilih Pemula tahun 2019.
- d. Manfaat bagi peneliti memperluas wawasan peneliti mengenai berbagai macam fenomena pemilu yang ada di Indonesia.